

PERILAKU PEMILIH MENJELANG PILKADA SERENTAK 2015 DI KOTA SEMARANG

Ari Pradhanawati, Naili Farida, Wahid Abdulrahman, Marten Hanura

Abstract

Indonesian political dynamics over the last 16 years since the Reformation movement initiated, the building shows the fragility of the Indonesian political experience. This can be seen how the level of community participation in the General Election in the Reformation era tend to decline until today. Election deemed not produce leaders who provide real change. This is exacerbated by the political system characterized transactional fraud. The purpose of this study was to look at the political behavior of society and give provisions regarding political education to the public ahead of the elections simultaneously in Semarang, especially in the Village Meteseh and Mangunharjo on December 2015. In this research use several theories: theory of rational choice and the theory of political participation.

Keywords : political behaviour, political education, election

Pendahuluan

Dinamika politik Indonesia selama 16 tahun terakhir sejak gerakan reformasi digulirkan, menunjukkan bangunan politik Indonesia mengalami kerapuhan. Fondasi untuk membangun pendidikan politik cenderung diabaikan. Persoalan yang mendasar adalah karena pendidikan politik sejak 16 tahun terakhir ini belum berjalan secara maksimal. Hal ini dapat dilihat bagaimana tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan umum (pemilu) di era reformasi cenderung menurun. Penurunan partisipasi masyarakat mengikuti pemilu berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), menunjukkan bahwa Pemilu Legislatif 1999 sebesar 92,7 persen, Pemilu Legislatif 2004 sebesar 84,07 persen, Pemilu Presiden I/2004 sebesar 78,53 persen, Pemilu Presiden II/2004 sebesar 76,66 persen, Pemilu Legislatif 2009 sebesar 71 persen dan Pemilu Presiden 2009 sebesar 72,09 persen. Sedangkan Pemilu Legislatif 2014 sebesar 75 persen dan Pemilu Presiden 2014 sebesar 70,91 persen (KPU Dalam Angka, 2014).

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilu terjadi karena berbagai faktor, antara lain: kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilihan umum dan partai politik. Juga karena pemilu dirasa tidak menghasilkan pemimpin yang memberikan perubahan yang nyata. Hal ini diperburuk dengan sistem politik transaksional yang diwarnai kecurangan. Berkenaan dengan calon legislatif, selama ini kurang ada keberanian untuk melakukan kontrak politik. Hal ini mengindikasikan mereka hanya menjadikan masyarakat sebagai komoditas politik semata. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat juga dikarenakan partai politik lebih banyak memberikan pendidikan politik bagi kadernya saja, namun masyarakat umum yang tidak terlibat menjadi kader partai belum bisa mengakses untuk mendapatkan pendidikan politik. Akibatnya, proses demokrasi yang berjalan di Indonesia mengalami banyak hambatan (Pradhanawati, 2013).

Demikian halnya dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) sebagai instrumen demokrasi di ranah lokal yang memberikan kesempatan pada warga untuk dapat menentukan kepala daerahnya

secara langsung. Dalam skala yang lebih luas, pilkada sebagai wujud desentralisasi politik yang menghadirkan nilai-nilai ideal. Kebijakan desentralisasi menurut pandangan Smith (dalam Lili Romli, 2007:5), mempunyai beberapa tujuan: *Pertama*, desentralisasi diterapkan dalam upaya untuk pendidikan politik. *Kedua*, untuk latihan kepemimpinan politik. *Ketiga*, untuk memelihara stabilitas politik. *Keempat*, untuk mencegah konsentrasi kekuasaan di pusat. *Kelima*, untuk memperkuat akuntabilitas publik. *Keenam*, untuk meningkatkan kepekaan elit terhadap kebutuhan masyarakat.

Sepanjang 2015 di Provinsi Jawa Tengah, telah digelar 21 pilkada secara serentak meliputi: Kota Semarang, Kabupaten Rembang, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purbalingga, Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kota Pekalongan, Kabupaten Blora, Kabupaten Kendal, Kota Magelang, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Semarang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Pekalongan (KPU Jawa Tengah, 2015).

Dari 21 penyelenggaraan pilkada tersebut, sebagian besar tingkat partisipasi pemilih pada pilkada lima tahun yang lalu kurang dari 60% (KPU Jawa Tengah, 2014). Dalam konteks demokrasi, partisipasi politik merupakan ciri khas modernisasi politik. Partisipasi politik merupakan kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan kebijakan dengan tujuan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Partisipasi politik yang tinggi dari warga negara dalam politik juga merupakan bentuk demokrasi yang sehat. Sementara itu, Milbrath dan Goel (dalam Sastroatmodjo, 1995: 74-77) membedakan partisipasi menjadi beberapa kategori. Pertama, adalah apatis. Kedua adalah spektator. Ketiga adalah gladiator, yaitu orang-orang yang aktif dalam proses politik, entah sebagai komunikator dengan tugas khusus mengadakan tatap muka, aktivis partai. Keempat adalah kritikus, yaitu orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.

Dalam dimensi pemilih, latar belakang pendidikan, tingkat ekonomi, ketertarikan pemilih, nampaknya memiliki pengaruh yang besar terhadap pemahaman pemilih terhadap pilkada maupun pengetahuan terhadap tata cara teknis penggunaan hak suara. Semakin tinggi tingkat pendidikan pemilih semestinya berkorelasi positif terhadap pemahaman akan makna pemilu maupun tata cara teknis didalamnya, meskipun memang pada satu sisi juga berpotensi untuk tidak menggunakan hak pilihnya sebab alasan ideologis rasional.

Akan tetapi hal tersebut tentu tidak sepenuhnya digeneralisasi mengingat tingkat pendidikan pemilih pada saat yang sama tidak serta merta berkorelasi terhadap ketertarikan pemilih terhadap proses politik kebangsaan. Sehingga tidak hanya kekayaan informasi teknis penggunaan suara yang minim namun juga pemahaman terhadap hakikat pemilu itu sendiri yang masih kurang. Pada tataran itulah makna sosialisasi pilkada bagi pemilih menjadi penting, tidak hanya dari perspektif kuantitas namun juga dalam dimensi keberlanjutan proses demokrasi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini : (1) Sejauh mana Pendidikan Politik Menjelang Pilkada Serentak di Kota Semarang dengan menggunakan hasil penelitian terdahulu, "Modal Sosial dan Perilaku Memilih Masyarakat Kota Semarang Dalam Pemilu 2010" dipahami oleh masyarakat Kelurahan Meteseh dan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang?; (2) Sejauhmana masyarakat Kelurahan Meteseh

dan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang akan menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Kota Semarang 2015?; (3) Sejauhmana tingkat partisipasi pemilih di Kelurahan Meteseh dan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang dalam Pilkada Kota Semarang 2015?

Tujuan dari penelitian ini untuk melihat perilaku memilih dan memberikan bekal mengenai pendidikan politik jelang Pilkada Serentak 2015 kepada masyarakat di Semarang, khususnya Kelurahan Meteseh dan Kelurahan Mangunharjo. Sedangkan manfaat dari penelitian ini: (1) diharapkan dapat memberi masukan tentang konsep pilkada yang baik jelang Pilkada Serentak di Kota Semarang 2015 berdasarkan hasil penelitian Pemilukada 2010; (2) mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Serentak di Kota Semarang 2015; (3) mengajak masyarakat untuk meningkatkan partisipasi politik dalam Pilkada serentak di Kota Semarang 2015.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat pada 30 Juli 2015 di Kelurahan Meteseh dan Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Sampel dalam penelitian ini adalah pemilih atau warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pemilukada, yaitu mereka yang sudah berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah pada saat memilih. Tipe penelitian menggunakan *explanatory*. Pengambilan sampel menggunakan *accidental sampling*. Jumlah sampel sebanyak 32 orang. Responden terpilih adalah peserta yang diundang sosialisasi pendidikan politik dan mengisi kuesioner. Responden terdiri dari laki-laki 88,9% dan perempuan 12,1 %. Usia responden antara 17-25 tahun sebesar 24,2 %, usia 26-35 tahun sebesar 9,09%, usia 36-45 tahun sebesar 24,2%, usia 46-55 tahun sebesar 24,2%, sedangkan usia yang lebih dari 55 tahun sebesar 12,1%. Sedangkan jenis pekerjaan responden: petani 3,03%, buruh 24,2%, PNS 21,2%, Wiraswasta 24,2%, Pensiunan 6,06%, guru 6,06%, dan pelajar 15,1%.

Pembahasan

Kelurahan Mangunharjo dan Meteseh yang berada di wilayah Kecamatan Tembalang merupakan wilayah yang heterogen dari aspek pendidikan dan ekonominya, di mana antara penduduk asli dengan pendatang memiliki persentase yang hampir berimbang. Banyaknya perumahan di wilayah tersebut sangat mempengaruhi pola interaksi masyarakat yang pada akhirnya akan berdampak terhadap perilaku memilih. Dari aspek budaya, pola interaksi penduduk asli masih sangat kental dengan nuansa kekerabatan, kegotongroyongan dan berbagai ritual kebudayaan yang tercermin dalam kegiatan-kegiatan hajatan warga. Sedangkan penduduk pendatang mencerminkan pola kehidupan masyarakat modern perkotaan yang lebih cenderung individualis. Inilah latar belakang budaya yang kemudian membawa pengaruh terhadap perilaku memilih di mana di kawasan perumahan ada kecenderungan perilaku memilih yang individualis dan di kawasan penduduk asli masih kuat pola *patron and client* dalam memilih. Hal ini nampak dari perolehan suara dalam Pileg lalu dimana di kawasan penduduk asli sangat kuat partai-partai yang memiliki basis masa tradisional seperti PDI Perjuangan, sedangkan di wilayah perumahan perolehan suara partai/caleg sangat beragam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden sebanyak 89,9% mengetahui bahwa pilkada serentak diselenggarakan pada 9 Desember 2015, sedangkan yang tidak tahu sebesar 9,09%. Hal ini menunjukkan bahwa ada kesadaran masyarakat untuk mendapatkan akses informasi, misalnya dari beberapa media seperti koran (36,4%) dan radio (21,2%). Responden juga menunjukkan untuk berpartisipasi secara antusias dalam pilkada serentak, karena mereka menaruh harapan yang cukup besar terhadap perubahan yang diinginkan yaitu dengan kategori sangat yakin (18,2%), yakin (57,6%). Sedangkan masyarakat yang pesimis memiliki prosentase cukup kecil yaitu yang menjawab tidak yakin (9,09%) dan tidak tahu (6,06%).

Selanjutnya hasil penelitian menjelaskan bahwa responden memaknai simbol-simbol dalam interaksi simbolik melalui sikap politiknya yang ditandai dengan keinginan mereka untuk menggunakan hak pilih. Sedangkan unsur penentu responden memilih karena pemimpin dianggap bisa melakukan perubahan (12,1%), terbukti pengalamannya dalam memimpin sebesar (9,09%), rajin bersosialisasi (6,06%), figur pribadi (3,03%), anjuran tokoh ormas/partai (3,03%).

Dalam perspektif kelembagaan politik, minimnya pengetahuan publik terhadap program para calon menjadi kritik tersendiri bagi partai politik. Mengambil buah pikiran Miriam Budiardjo (2008: 367-370) bahwa salah satu fungsi utama partai politik adalah sosialisasi politik yang terjabarkan melalui distribusi program calon yang diusung partai kepada publik. Peran strategis partai politik dalam pilkada serentak tidak semestinya berjalan hanya pada tahap pencalonan semata (rekrutmen), lebih dari itu sosialisasi politik mesti beriringan dengan pendidikan politik kepada publik melalui distribusi program dan penilaian atas program-program tersebut. Hasil penelitian menjelaskan bahwa program-program yang terkait dalam visi bakal calon walikota yang diharapkan oleh masyarakat diantaranya penyediaan lapangan pekerjaan (39,4%), pembangunan infrastruktur (15,1%), peningkatan kualitas dan fasilitas pendidikan (12,1%).

Perilaku memilih di Kota Semarang dapat dikategorikan sebagai pemilih yang rasional. Menurut pendapat Joko J Prihatmoko (2004:49), pemilih rasional adalah pemilih yang semakin cerdas, kritis, berani menuntut, dan tidak dibohongi elite politik, dalam menggunakan hak pilih mereka lebih cermat dan rasional. Pandangan Firmanzah (2007: 222), pemilih yang rasional adalah pemilih yang mengambil keputusan melalui suatu proses, mempergunakan kalkulasi untuk mendapatkan keuntungan yang bersumber dari isi atau muatan yang menjadi pertimbangannya.

Langkah persuasif untuk meyakinkan pemilih dengan politik uang nampaknya akan menjadi salah satu strategi untuk meraih suara dalam sisa waktu yang ada. Dalam konteks tersebut, pemilih di Kota Semarang merupakan model pemilih yang kritis. Hasil penelitian membuktikan, sikap responden terhadap politik uang jika ada pihak yang akan memberi uang atau barang untuk menggunakan hak pilihnya: (1) yang menolak terhadap praktek politik uang sebesar 42,4%; (2) yang menerima politik uang tetapi memilih sesuai hati nurani sebesar 39,4%; dan (3) sisanya sebesar 3,03% bersikap menerima dan tidak akan memilih.

Perilaku memilih dalam pandangan teori pilihan rasional menjelaskan bahwa perilaku memilih merupakan reaksi bukan aksi. Sehingga tindakan tidak memilih merupakan reaksi terhadap situasi atau hal-hal tertentu dalam pemilu yang dinilai merugikan (Joko J Priatmoko, 2008: 212-213). Hal ini juga sejalan dengan pandangan Weber dalam Siahaan (1983 : 218 -220), bahwa tindakan sosial seseorang dipengaruhi oleh *zweck*

rational, yaitu tindakan sosial yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan manusia yang rasional di dalam merespon kondisi eksternalnya (termasuk tanggapan terhadap orang lain di luar dirinya dalam upaya mencapai tujuan yang maksimal dengan pengorbanan yang seminimal mungkin).

Hasil penelitian tentang siapa kandidat yang akan dipilih dalam pemilu serentak esok? menjadi pertanyaan yang cukup menarik. Jika pilkada serentak akan diselenggarakan pada saat itu tampaknya masyarakat belum punya pilihan yang pasti, siapa bakal calon yang akan dipilihnya. Hal ini bisa dilihat dari yang memilih pasangan Hendrar Prihadi-Hevearita (12,1%), Soemarmo-Zubair (12,1%). Sedangkan mereka yang belum punya pilihan sebesar 66,7%. Sehingga kemungkinan besar siapa bakal calon yang akan memenangkan Pilkada Serentak 2015 belum bisa dilihat. Tingginya angka yang belum memiliki pilihan (66,7 %) merupakan potensi yang besar bagi pemilih untuk berganti pilihan atau ada pemilih tidak setia pada satu kandidat dan akan berganti pilihan (*swing voters*). Suara pemilih yang seperti itu harus diperhatikan dan dikelola oleh kandidat, misalnya melalui modal sosial yang sudah mapan dari tingkat rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, sampai kecamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sebesar 3,03% responden menyatakan ada kedekatan dengan partai politik, sisanya 96,9 % menjawab tidak ada kedekatan dengan partai politik.

Sebagai wilayah yang heterogen dari aspek pendidikan dan tingkat ekonomi, intensitas pasangan calon dalam berinteraksi secara langsung dengan pemilih serta melakukan kegiatan sosial di Kelurahan Meteseh dan Mangunharjo menjadi faktor yang akan sangat menentukan keberhasilan pasangan calon menarik suara. Hal tersebut nampak dari model kampanye yang dinilai oleh pemilih paling efektif yakni dialog atau tatap muka secara langsung (39%) dan kegiatan social (42%).

Hasil Pilkada Serentak Kota Semarang 2015 (KPU Kota Semarang, 2015) menunjukkan pasangan Hendrar Prihadi-Hevearita berada di urutan pertama memperoleh 320.237 suara sah (46,36%), pasangan Soemarmo HS-Zubair S di urutan kedua dengan 220.745 suara sah (31,96 %), pasangan Sigit Ibnugroho-Agus Sutyoso di urutan ketiga mendapat 149.712 suara sah (21,68 %).

Kemenangan pasangan Hendrar Prihadi-Hevearita yang mendapatkan suara sah 320.237 atau 46,36% (KPU Kota Semarang, 2015) lebih banyak disebabkan oleh faktor petahana, rekam jejak dan kinerja petahana ketika berkuasa sangat menentukan, yaitu selama menjabat kepala daerah selalu membangun kepercayaan dan dekat dengan rakyat, peduli pada rakyat dan mencurahkan segala kemampuan dan pikirannya demi kemajuan wilayah dan rakyat.

Terlebih ketika petahana menjalankan program-program yang bersentuhan langsung dengan apa yang dibutuhkan masyarakat, seperti bidang ekonomi kerakyatan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Maka petahana yang memiliki rekam jejak seperti ini sangat berpotensi dan dengan sangat mudah untuk terpilih kembali. Tetapi sebaliknya, jika petahana tidak amanah dan tidak peka serta menjaga jarak dengan rakyat secara mudah cenderung akan ditinggalkan rakyatnya.

Kehadiran petahana setidaknya mempunyai beberapa keunggulan baik bersifat positif maupun negatif. Pertama, didukung oleh popularitas dan elektabilitas yang tinggi. Tentu sudah sewajarnya jika petahana unggul

dibandingkan calon lain, karena sering muncul di media massa dan secara tidak langsung dapat berfungsi sebagai iklan gratis dalam menaikkan tingkat popularitas. Kedua, petahana memiliki modal informasi yang cukup mendalam tentang peta permasalahan di daerahnya, dukungan modal logistik, dan jaringan dengan berbagai elemen masyarakat baik di pusat maupun di daerah. Jika kelebihan tersebut dimanfaatkan seefektif mungkin dalam interval lima tahun, petahana sudah dipastikan berpeluang besar menang dalam pemilihan kepala daerah (pemilukada) dibandingkan calon yang lain. Ketiga, petahana lebih banyak diuntungkan dengan jabatannya. Secara politik, jabatan bagi petahana adalah modal prestisius, karena dengan mudah para petahana bisa memanfaatkan program-program pemerintah daerah seperti peningkatan dana pembangunan infrastruktur serta menyalurkan bantuan-bantuan sosial dan hibah pada masyarakat menjelang pemilukada. Keempat, petahana bisa melakukan intervensi terhadap penyelenggara pemilukada yaitu Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Sebab petahana memiliki kewenangan, khususnya dalam anggaran pemilukada. Apalagi bila unsur sekretariat KPUD berasal dari pegawai pemerintah daerah, sudah barang tentu petahana cenderung mendapatkan keistimewaan dibandingkan kadidat lain. Maknanya, pemilih mulai melakukan perubahan dalam memilih pemimpin dan tidak memandang simbol-simbol latar belakang tetapi lebih banyak melihat faktor kapabilitas kandidat (pdiyog.blogspot.co.id).

Hendrar Prihadi sebagai calon petahana memiliki peluang yang cukup besar untuk memenangkan pilkada serentak dikarenakan masyarakat menilai selama pemerintahan Hendrar Prihadi cukup baik. Prosentasi responden yang menganggap pemerintahan Hendrar Prihadi sangat baik (33,3%), baik (45,4%). Sedangkan masyarakat yang tidak puas memiliki prosentase sangat kecil, seperti yang menilai pemerintahan Hendrar Prihadi sangat buruk (3,03%), biasa saja (6,06%). Sedangkan lawannya Soemarmo tampaknya masih memiliki citra negatif pada masyarakat karena pernah tersangkut kasus korupsi, sedangkan Sigit Ibnu Nugroho sebagai pendatang baru dalam dunia perpolitikan di Semarang masih kurang dikenal oleh masyarakat. Sehingga pada Pilkada Serentak di Semarang 9 Desember 2015 dimenangkan oleh Hendrar Prihadi.

Meskipun publik masih minim terhadap pengetahuan program calon, namun gairah partisipasi politik dengan menggunakan hak pilihnya cukup besar. Hasil penelitian menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat Kota Semarang pada Pilkada Serentak 2015 sebesar 65,97% atau 731.407 suara sah dari total daftar pemilih tetap (DPT) 1.109.045 orang, ini mengalami peningkatan dibanding Pemilukada 2010 yang hanya 60%. Memang tingkat partisipasi tidak mencapai target seperti yang dicanangkan KPU Pusat 77,5% (www.koran-sindo.com).

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dapat ditarik simpulan berikut, bahwa Masyarakat Kelurahan Meteseh dan Mangunharjo:

1. Mampu memahami konsep mengenai Pilkada Serentak yang akan diselenggarakan di Kota Semarang 2015.
2. Menunjukkan minat untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Serentak di Kota Semarang 2015.
3. Akan meningkatkan partisipasi politik dalam Pilkada Serentak di Kota Semarang 2015 dengan menggunakan hak pilihnya

DAFTAR PUSTAKA**Buku:**

Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Firmanzah. (2007). *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik Di Era Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Prihatmoko, Joko J. (2008). *Mendemokratiskan Pemilu Dari Sistem Sampai Elemen Teknis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

_____. (2005). *Pemilihan Kepala Daerah Langsung filosofi, sistem dan problema penerapan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Romli, Lili. (2007). *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sastroadmodjo, Sudijono. (1995). *Perilaku Politik*. Semarang: Ikip Semarang Press

Siahaan, Hotman (et al.) .(1983). *Struktur Sosial Kebudayaan Masyarakat Tepian Kota*, Surabaya: Lembaga Penelitian, Universitas Airlangga.

Non Buku:

Pradhanawati, Ari. *Golput, Sikap Politik Rakyat*. Wacana. Suara Merdeka. 27 Mei 2013

KPU Dalam Angka 2014. Jakarta.

KPU Jawa Tengah Dalam Angka 2015. Semarang.

KPU Jawa Tengah Dalam Angka 2014. Semarang.

KPU Kota Semarang Dalam Angka, 2015. Semarang.

Internet:

Incumbent, Andriadi Achmad, [online] dalam <http://pdiyog.blogspot.co.id/2010/11/incumbent.html>, diakses 3 Februari 2016

Kemenangan Hendi Disertai Catatan. [online] dalam <http://www.koran.sindo.com/news.php?r=5&n=64&date=2015-12-17>, diakses 30 Januari 2016